

Katalog : 7102025.7318

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TANA TORAJA 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANA TORAJA**
BPS-Statistics of Tana Toraja Regency



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TANA TORAJA 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANA TORAJA**
BPS-Statistics of Tana Toraja Regency

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TANA TORAJA 2021

No. Katalog	: 7102025.7318
No. Publikasi	: 73180.2205
Ukuran Buku	: 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: 32 halaman + viii
Naskah	: Antik Tintriani, S.Tr.Stat.
Penyunting	: Madsutriman Achmad, S.Si
Gambar Kulit	: Antik Tintriani, S.Tr.Stat.
Diterbitkan oleh	: ©BPS Kabupaten Tana Toraja

Dilarang mengumumkan, mendistribusi, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

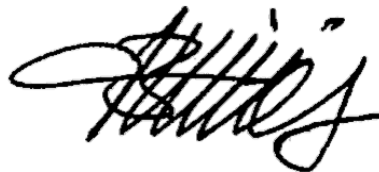
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2021 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tentang indikator perekonomian daerah dan salah satu dari lima variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja menerbitkan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Toraja 2021. Publikasi tahunan ini diharapkan dapat memberi gambaran secara umum tentang perkembangan harga barang dan jasa di sektor konstruksi yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

Penghitungan angka indeks ini dilakukan oleh BPS, dengan menggunakan data dasar hasil survei IKK triwulanan dari triwulan III tahun 2020, Triwulan IV tahun 2020, triwulan I dan triwulan II tahun 2021. Untuk kota acuan yang digunakan dalam perhitungan indeks tahun 2021 Kota Makassar. Kota acuan sebelumnya adalah Semarang untuk perhitungan IKK tahun 2018-2020.

Semoga penerbitan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Toraja 2021 ini dapat bermanfaat bagi para semua pengguna data. Saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki konten publikasi dikemudian hari akan kami terima dengan sepenuh hati.

Makale, Juli 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tana Toraja



Lukitoningtyas, SST.M.Si.
NIP. 197901172000122002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi.....	3
1.3 Cakupan Data.....	4
1.4 Konsep dan Definisi.....	6
II. Metodologi.....	14
III. Ulasan Ringkas	19
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja.....	19
3.1.1 Kondisi Geografis.....	19
3.1.2 Transportasi Antar Wilayah.....	21
3.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Tana Toraja	23
3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Toraja	24
IV. Lampiran.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	26
Gambar 2. IKK dan DAU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021..	27

<https://tatorkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tana Toraja Menurut Kecamatan, 2021	20
Tabel 2. Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020	22
Tabel 3. Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2020.. ..	23
Tabel 4. Indeks Kemahalan Kostruksi (IKK) Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021	30

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otodas) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain mendorong percepatan pembangunan daerah, kebijakan Otonomi Daerah juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah melalui

pemerataan keuangan antar daerah. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Dengan kata lain, kebijakan Otonomi Daerah dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal dan terbelakang, baik dalam kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alamnya.

Namun demikian, kewajiban pembiayaan yang berlangsung di daerah tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 28 ayat (1) tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa kebutuhan fiskal di daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan umum. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Ketimpangan dalam kebutuhan fiskal daerah tersebut kemudian diakomodasi dalam pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. Beberapa indikator diperlukan untuk menghitung kebutuhan DAU suatu daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Oleh karena itu, penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) penting dilakukan sebagai salah satu komponen penyusun kebutuhan DAU suatu daerah.

1.2 Tujuan Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Perhitungan IKK yang merupakan salah satu variabel dalam menyusun besaran DAU suatu daerah digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Oleh

karena itu, diperlukan suatu indikator untuk membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah. Tersedianya angka IKK merupakan upaya dalam rangka menyediakan data dasar untuk kebijakan dana perimbangan pemerintah Indonesia.

1.3 Cakupan Data

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi adalah data harga perdagangan besar bahan bangunan konstruksi, sewa alat berat konstruksi, dan jasa konstruksi. Data tersebut dikumpulkan melalui kegiatan Survei Indeks Kemahalan Konstruksi yang dilaksanakan secara serentak mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah sampel rata-rata 15 responden tiap kabupaten/kota setiap 3 bulan sekali yaitu pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Survei Indeks Kemahalan Konstruksi mencakup data harga dari 33 jenis barang dengan 187 jenis kualitas barang, serta harga sewa dari 6 jenis alat berat dan 8 jenis upah jasa konstruksi.

Data lain yang dikumpulkan adalah data realisasi APBD dan *Bill of Quantity* (BoQ) sebagai dasar untuk menghitung Diagram Timbang Umum IKK kabupaten/kota. Data realisasi APBD merupakan data pengeluaran pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, yang mencakup kegiatan

pembangunan fisik gedung/konstruksi dari masing-masing kelompok jenis bangunan. Data ini diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, melalui Survei Keuangan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh BPS setiap tahun. Sedangkan data BoQ diperoleh dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) suatu proyek yang sudah selesai.

1.4 Konsep dan Definisi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan. Sesuai dengan pemahaman tersebut, IKK dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang dapat menjelaskan perbandingan harga suatu komoditi tertentu pada lokasi yang berbeda-beda dalam kurun waktu/periode tertentu.

Pada dasarnya, penghitungan IKK mengacu pada pengelompokan jenis bangunan konstruksi yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2005, yaitu :

1. **Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal**, mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya.

2. **Prasarana Pertanian**, meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air, bagan, perعتakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya.
3. **Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan**, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya.
4. **Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi**, mencakup bangunan pengolahan penyaluran dan penampungan air bersih/air limbah/drainase, bangunan pengolahan/penyaluran dan penampungan barang migas bangunan elektrikal, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, instalasi listrik bangunan sipil, instalasi navigasi laut dan sungai, instalasi meteorologi dan geofisika, instalasi navigasi udara, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu - rambu jalan raya, instalasi telekomunikasi.

5. **Bangunan Lainnya**, mencakup bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya, pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Namun, di karenakan tidak semua wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) di Indonesia memiliki kelima jenis bangunan konstruksi di atas, maka penghitungan IKK pun disesuaikan menjadi hanya mengacu pada 3 (tiga) kelompok jenis bangunan konstruksi saja agar angka IKK yang dihasilkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dihasilkan dapat lebih mempunyai keterbandingan/*comparable*. Adapun 3 (tiga) kelompok jenis bangunan konstruksi tersebut adalah :

1. **Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal**, yang terdiri dari :

- a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun dan perumahan dinas.
- b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan monumental.

2. Jalan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang terdiri dari :

- a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:
 - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendungan (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan:
 - Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan dan jembatan kerera, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- c. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi:
 - Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

- Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
- Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah, saluran drainase pada gedung.
- Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

3. Bangunan Lainnya, yang meliputi bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi

eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat konstruksi, dan jasa konstruksi yang diperoleh dari survei secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Bahan-bahan bangunan, sewa alat berat konstruksi, dan jasa konstruksi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKK disebut sebagai paket komoditas. Adapun paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2020 terdiri atas 33 jenis bahan bangunan, 8 alat berat (harga sewa) serta 5 jenis jasa di bidang konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :

Bahan Bangunan : tanah uruk, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, kayu balok, kayu papan, bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II., seng gelombang, paku, semen, besi beton, bak mandi, kloset, seng plat, pipa PVC, kayu lapis/triplek, cat emulsi, cat minyak, tegel/keramik, genteng/atap, kaca, aspal, gypsum, kabel, mesin pompa air, rangka atap baja, aluminium, tangki air fiber, lampu dan MCB.

Alat Berat : *excavator, bulldozer, loader, tandem/vibrating roller, motor grader, asphalt finisher, generator set, dan dump truck*

Jasa Konstruksi : upah kepala tukang, upah tukang kayu, upah tukang batu, upah tukang listrik, upah pembantu tukang.

Jenis-jenis bahan bangunan, alat berat, dan jasa konstruksi tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil yang cukup besar dalam membangun setiap kelompok jenis bangunan serta harga sewa dari barang-barang tersebut mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Selain beberapa konsep dan definisi yang telah dijelaskan di atas, masih ada beberapa konsep dan definisi lainnya yang berkaitan dengan penghitungan IKK, antara lain :

Harga produsen ialah harga transaksi yang terjadi antara produsen/penghasil dan pedagang besar pertama dalam jumlah besar atas suatu jenis barang.

Harga Perdagangan Besar (HPB) ialah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli, secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang

Pedagang Besar (PB) ialah pengusaha/pedagang yang menjual barang secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.

Party/Grosir atau pembelian dalam jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batas pembelian secara *party/grosir* adalah relatif, mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.

Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.

Harga bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party/grosir*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/ supplier bahan bangunan/ konstruks dengan pengguna bahan bangunan tersebut.

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan

konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

Inflator merupakan nilai yang digunakan sebagai penyesuaian IKK terhadap kenaikan bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang/bobot terdiri atas diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi (TKK), yang disusun berdasarkan atas kuantitas/*volume* bahan-bahan bangunan/konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan per satuan ukuran luas. Sedangkan, diagram timbang umum digunakan untuk menghitung indeks kemahalan konstruksi (IKK) umum, yang disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

II. Metodologi

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama

persis karena masing- masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang dapat mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja

tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada di atas harga input tetapi di bawah harga *output* karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Pengumpulan data di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BoQ). Secara garis besar

proses penghitungan IKK 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota, dengan rumus :

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k q_k$$

dengan,

NK_j = Nilai komponen ke-J

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-J

2. Melakukan penghitungan nilai *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CDP), dengan rumus :

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_i P_i + \varepsilon$$

dengan,

NK_j = Nilai komponen ke-J

C_i = dummy kabupaten/kota ke-i

P_i = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

α_i dan β_i = Koefisien regresi

PPP (*Purchasing Power Parity*) $_{sistem_i} = \exp(\alpha_i)$

Untuk kota acuan yang berfungsi sebagai pembandingan, nilai C_i = dummy kota acuan = 0

3. Melakukan penghitungan PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut :

$$PPP \text{ (*Purchasing Power Parity*)}_{Proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{Bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

dengan,

n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek

4. Melakukan perhitungan terakhir yaitu menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut :

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{Proyek_i})^{w1_i} \right) \cdot 100$$

dengan,

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

III. Ulasan Ringkas

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja

3.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang dikenal dengan keindahan panorama alam atas awannya. Ibukota Kabupaten Tana Toraja terletak di Kecamatan Makale dan memiliki 19 kecamatan, 112 desa, dan 47 kelurahan. Kabupaten Tana Toraja berjarak 329 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja masih mempertahankan gaya hidup khas suku Toraja yang memperingati hari kematian atau Rambu Solo' dan upacara syukuran atau Rambu Tukak. Kedua upacara ini semakin menambah pesona Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu daerah pariwisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara astronomis, Kabupaten Tana Toraja terletak pada posisi titik koordinat 2,83 – 3,5 Lintang Selatan dan 119,40 – 120,08 Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, dan di sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Luwu. Berdasarkan perbatasan wilayahnya tersebut, Kabupaten Tana Toraja merupakan Kabupaten yang tidak berbatasan dengan laut atau *land lock*.

Total luas wilayah Kabupaten Tana Toraja mencapai 2054,30 km². Kecamatan terluasnya adalah Kecamatan Malimbong Balepe dengan luas sebesar 211,47 km² atau sekitar 10,3 persen dari total luas Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan, Kecamatan Mappak merupakan kecamatan terjauh dari Makale sebagai ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan jarak 86,2 km. Keseluruhan total wilayah per kecamatan di Kabupaten Tana Toraja terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tana Toraja Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Bonggakaradeng	206,76
Simbuang	194,82
Rano	89,43
Mappak	166,02
Mengkendek	196,74
Gandangbatu Sillanan	108,63
Sangalla	36,24
Sangalla Selatan	47,80
Sangalla Utara	27,96
Makale	39,75
Makale Selatan	61,70
Makale Utara	2,08
Saluputti	87,54
Bittuang	163,27

Rembon	134,47
Masanda	134,77
Malimbong Balepe	211,47
Rantetayo	60,35
Kurra	60,50
Tana Toraja	2054,30

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja

Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan keringgian berkisar antara 300-2500m di atas permukaan laut. Bagian terendah berada di Kecamatan Bonggakaradeng, sednagkan bagian tertinggi berada di Kecamatan Bittuang.

3.1.2 Transportasi Antar Wilayah

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat, yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah diduga berpengaruh besar. Dengan demikian kondisi jalan menjadi syarat utama dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi. Data pada tahun 2020 menunjukkan panjang jalan kabupaten di Kabupaten Tana Toraja tercatat sepanjang 1180,3 kilometer.

Dilihat dari jenis permukaannya, jalan dengan permukaan aspal tercatat sepanjang 218,30 kilometer jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 660,20 kilometer, jalan dengan permukaan tanah sepanjang 161,20 kilometer, dan jalan dengan permukaan (tidak dirinci dalam hal ini beton) sepanjang 140,60 kilometer.

Tabel 2. Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2020

Kondisi Jalan	2019	2020
Diaspal	245,30	218,30
Kerikil	603,50	660,20
Tanah	123,50	161,20
Tidak dirinci	208,00	140,60
Jumlah	1180,3	1180,3

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tana Toraja

Dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 667,15 kilometer, yang tergolong kondisi

sedang sepanjang 145 kilometer, yang tergolong kondisi rusak sepanjang 76,35 kilometer, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 291,80 kilometer.

Tabel 3. Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2020

Kondisi Jalan	2019	2020
Baik	147,75	667,15
Sedang	463,65	145
Rusak	309,85	76,35
Rusak Berat	259,05	291,80
Jumlah	1180,3	1180,3

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tana Toraja

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak barang masuk dari luar Kabupaten Tana Toraja menuju Kabupaten Tana Toraja. Akses barang masuk dari luar Kabupaten Tana Toraja melalui Jalan Poros Makassar-Tana Toraja melalui Kecamatan Gandang Batu Silanan.

3.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Tana Toraja

Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun

sebelumnya. IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Besaran DAU Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 537.030.126.000,00

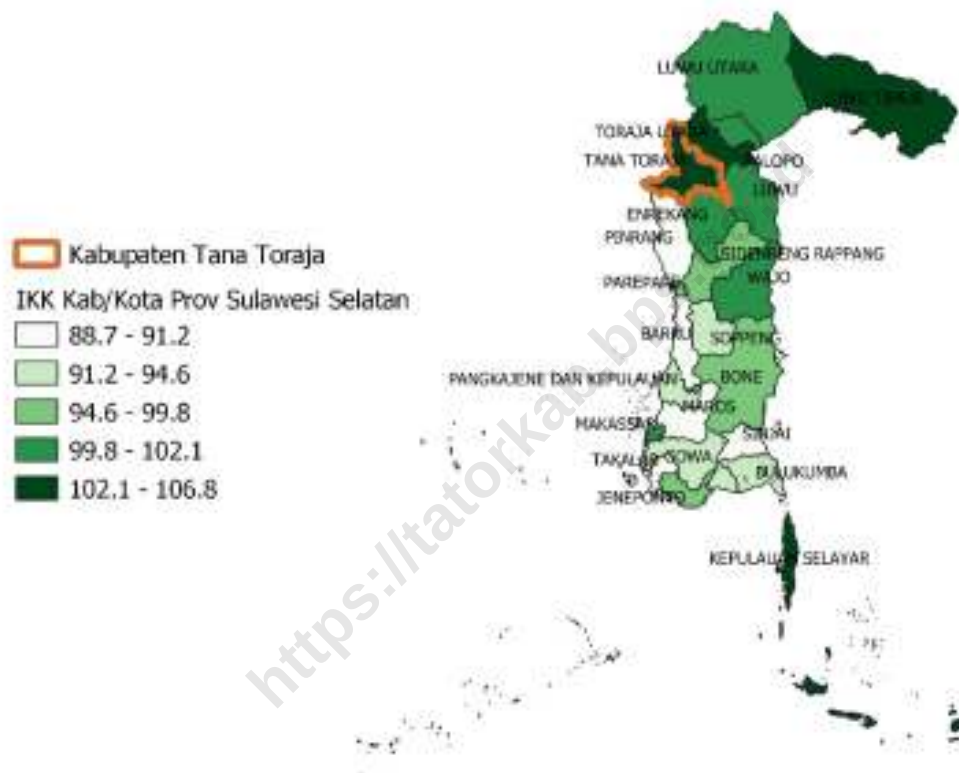
3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tana Toraja

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Pada tahun 2021, kota di Indonesia yang menjadi kota acuan adalah Kota Makassar (IKK = 100). Semakin besar IKK menunjukkan relatif semakin tinggi harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

Pada tahun 2021, nilai IKK Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 104,99. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Tana Toraja 4,99 persen lebih tinggi/mahal dibandingkan dengan kota acuan (Kota Makassar). Hal ini wajar karena sebagian besar barang konstruksi didatangkan dari luar Kabupaten Tana Toraja.

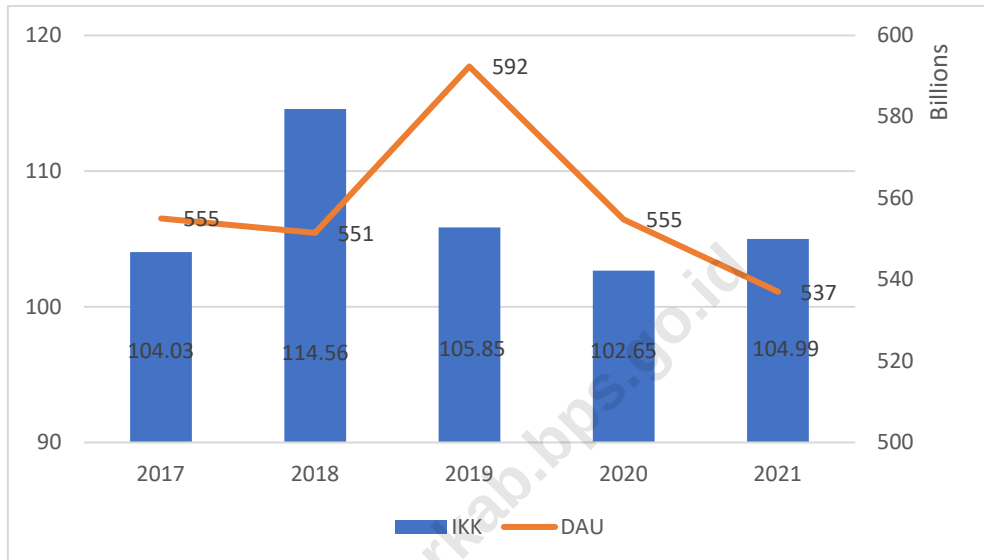
Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 Kabupaten Tana Toraja menempati urutan ke-2 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin kecil ranking IKK maka semakin besar nilai IKK suatu wilayah. Berikut kondisi IKK Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Semakin hijau warna suatu wilayah, maka semakin besar nilai IKKnya terhadap nilai IKK acuan.

Gambar 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2021, BPS

Gambar 2. IKK dan DAU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota, BPS; BPKAD Kabupaten Tana Toraja

IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Selama periode 2017-2021, DAU Kabupaten Tana Toraja kurang sejalan dengan besaran nilai IKK Kabupaten Tana Toraja. Pada tahun 2017 dan 2020 besaran IKK dan DAU Kabupaten Tana Toraja sejalan, namun pada tahun 2018, 2019, dan 2021 IKK dan DAU Kabupaten Tana Toraja tidak sejalan. Pada tahun 2018, IKK Kabupaten Tana Toraja naik, namun IKK yang diterima justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun yang lain. Begitupula pada tahun 2019, dimana nilai IKK Kabupaten Tana Toraja turun, namun DAU yang diterima begitu besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain.

Hal ini bisa jadi dapat dikarenakan faktor dari aspek lain di luar IKK seperti nilai IPM, jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB dalam aspek Kebutuhan Fiskal atau PAD, DBH Pajak, DBH SDA dalam aspek Kapasitas Fiskal, yang menyebabkan besaran DAU tidak sejalan dengan besaran IKK yang ada.

<https://tatorkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Selayar	92,41	95,36	116,28	112,16	108,84	104,21
2	Kab. Bulukumba	91,33	92,29	95,24	89,03	91,69	93,87
3	Kab. Bantaeng	95,83	90,00	96,74	90,84	86,04	91,40
4	Kab. Jeneponto	98,83	95,62	104,03	97,38	96,44	96,49
5	Kab. Takalar	91,29	89,21	92,19	92,71	88,36	89,07
6	Kab. Gowa	91,44	83,84	93,44	88,13	88,61	93,12
7	Kab. Sinjai	101,67	93,75	99,79	94,36	87,77	88,71
8	Kab. Maros	92,39	93,69	97,32	88,75	91,25	90,76
9	Kab. Pangkep	92,00	95,01	99,24	95,65	92,58	93,06
10	Kab. Barru	88,96	88,86	98,97	97,36	92,23	89,74
11	Kab. Bone	95,85	98,00	100,09	97,6	94,23	95,20
12	Kab. Soppeng	94,08	97,36	96,54	92,25	92,11	94,44
13	Kab. Wajo	96,44	96,76	100,19	98,74	98,16	101,61
14	Kab. Sidrap	96,87	98,28	102,34	95,11	89,87	95,38
15	Kab. Pinrang	97,23	97,69	106,9	98,31	95,10	90,83
16	Kab. Enrekang	99,37	98,85	107,22	103,63	102,31	100,79
17	Kab. Luwu	97,28	100,14	107,98	106,19	102,12	101,10
18	Kab. Tana Toraja	105,35	104,03	114,56	105,85	102,65	104,99
19	Kab. Luwu Utara	97,67	96,27	103,51	98,73	93,63	100,53
20	Kab. Luwu Timur	101,54	102,74	107,90	108,49	104,71	106,80
21	Kab. Toraja Utara	104,54	101,91	103,71	97,45	98,75	104,19
22	Kota Makassar	97,89	94,35	96,99	97,15	95,72	100,00
23	Kota Pare Pare	92,86	95,42	98,42	94,44	93,76	98,92
24	Kota Palopo	102,28	96,87s	105,03	100,25	99,75	102,74

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24	Kota Palopo	102,28	96,87s	105,03	100,25	99,75	102,74
	Sulawesi Selatan	99,11	95,57	101,96	97,34	95,11	96,84

<https://tatorkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANA TORAJA
BPS-Statistics of Tana Toraja Regency**

Jl. Tongkonan Ada' Makale Tana Toraja 91811
Telp/Fax : (0423) 24150 Homepage : tatorkab.bps.go.id
E-mail : bps7318@bps.go.id